

# Suarakan Prabowo Dua Periode, Dewan Pembina Soksi: Wajib Membela Kepentingan Rakyat

Category: Politik

written by Redaksi | 07/02/2025



**ORINEWS.id** – Dewan Pembina Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas Soksi) harus kembali ke khitahnya sebagai organisasi yang lahir dari rahim TNI Angkatan Darat yang kemudian bersama-sama dengan Kosgoro dan MKGR membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) Golongan Karya (Golkar) 20 Oktober 1964.

Demikian penegasan Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Dewan Pembina Depinas Soksi Bambang Soesatyo saat memimpin rapat pleno Dewan Pembina Soksi di Jakarta, Kamis 6 Februari 2025.

“Itulah sebabnya rapat pleno Dewan Pembina Soksi merekomendasikan agar Depinas Soksi harus kembali ke khitahnya, yaitu kembali ke garis perjuangan membela kepentingan rakyat bersama Presiden [Prabowo Subianto](#) sebagai putra terbaik TNI AD dan wajib mendukung kepemimpinan beliau dua periode,” kata Bamsuet

Lebih dari 30 anggota Dewan Pembina Soksi hadir antara lain Rudy Sanyoto, Ria Aritonang, Djoko Purwongemoro, Hamka Yandhu, Julius Hassan, Robert Sumendap, Mangantar Marpaung,

Robinson Napitupulu, Minadi Pujaya, Robert Sinaga, Purnama DN Sitompul, Between Lutam, Anton Sihombing, Achyar Amry, Soeharsoyo, Marcus M. Lubis, Sukotjo Said, Esron Panjaitan, Bambang Wiyogo, serta Sylvia A. Anggraeni.

Bamsoet menuturkan, keputusan Dewan Pembina Soksi akan disampaikan dalam rangka Musyawarah Nasional Depinas Soksi pada Mei 2025. Munas merupakan momentum penting bagi SOKSI untuk merumuskan kembali tujuan dan strategi organisasi.

“Sesuai jadwal, Munas Soksi akan dilaksanakan pada Mei 2025. Munas harus berjalan secara independen, tanpa intervensi dari pihak manapun,” kata Bamsoet.

Bamsoet menuturkan, independensi Munas Soksi sangat vital untuk memastikan keputusan yang diambil murni berdasarkan kebutuhan dan aspirasi anggotanya.

“Munas yang akan datang diharapkan dapat menjadi titik balik bagi Soksi untuk merumuskan kembali tujuan dan strategi perjuangan yang sinergis dengan arah kebijakan pemerintah,” pungkash Bamsoet.[]